

**DESAIN KEDUDUKAN KELEMBAGAAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

KHRISNA SURYA PRATAMA

C100150096

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**DESAIN KEDUDUKAN KELEMBAGAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

KHRISNA SURYA PRATAMA

C100150096

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iswanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Iswanto, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN
DESAIN KEDUDUKAN KELEMBAGAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT PASCA AMANDEMEN UUD 1945

OLEH

KHRISNA SURYA PRATAMA
C100150096

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 20 November 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Iswanto, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Jaka Susila, S.H., M.H., M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NPK 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 November 2019

Penulis,



KHRISNA SURYA PRATAMA

C100150096

DESAIN KEDUDUKAN KELEMBAGAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA AMANDEMEN UNDANG- UNDANG DASAR 1945

Abstrak

Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, terjadi perubahan terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, MPR diposisikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara pelaksana tunggal kedaulatan rakyat, namun setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, MPR tidak lagi diposisikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara pelaksana tunggal kedaulatan rakyat. Dari satu perspektif, tersebut memberikan dampak positif terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun dalam perspektif yang lain (seiring berjalannya dinamika ketatanegaraan Indonesia), perubahan tersebut justru menimbulkan berbagai permasalahan baru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan analisis data dengan sistem dekriptif-kualitatif. Hasil dari penulisan hukum ini diantaranya: pertama, perjalanan kelembagaan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan dapat dibagi kedalam 6 periodisasi dan dari 6 periode tersebut, kelembagaan dan kewenangan MPR belum pernah menjelma menjadi kelembagaan sebagaimana yang dicita-citakan oleh founding fathers ketika awal pembentukannya; kedua, urgensi dilakukannya desain terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR dan ketiga, kedepan MPR perlu diposisikan sebagai Lembaga Negara dengan kewenangan tertinggi. Keanggotannya pun akan kembali diramaikan dengan kehadiran utusan golongan..

Kata Kunci: desain, kelembagaan, kewenangan, mpr.

Abstract

After the amendment to the 1945 Constitution, there was a change to the institutions and authority of the MPR in the Indonesian constitutional system. Previously, the MPR was positioned as the Supreme State Institution implementing a single sovereignty of the people, but after making changes to the 1945 Constitution, the MPR was no longer positioned as the Supreme State Implementing Agency the sole sovereignty of the people. From one perspective, it has a positive impact on the Indonesian constitutional system. But in another perspective (along with the dynamics of Indonesian state administration), this change has created new problems. This research is a normative legal research with secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method uses document study techniques and data analysis with a descriptive-qualitative system. The results of writing this law include: first, the institutional journey and authority of the MPR in the constitutional system can be divided into 6 periods and from the 6 periods, the institutional and authority of the MPR has never been transformed into an institution as envisioned by the founding fathers when it was first formed;

second, the urgency of the design of the institutional and authority of the MPR and third, in the future the MPR needs to be positioned as the State Institution with the highest authority. Its membership will again be enlivened by the presence of group messengers.

Keywords: design, institutional, authority, mpr

1. PENDAHULUAN

Sepanjang perjalanan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang terhitung sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini, satu dari sekian banyak lembaga negara yang mendapatkan banyak sorotan publik oleh karena kedudukan dan kewenangannya dalam system ketatanegaraan Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Bagaimana tidak, dalam sejarahnya (sebelum reformasi), MPR dalam konteks yang global dapat dikatakan sebagai lembaga negara yang “unik”. Unik dalam hal ini dikarenakan MPR merupakan lembaga perwakilan yang kedudukannya berada diatas parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Biasanya, parlemen dianggap sebagai satu-satunya wadah yang mencakup wakil-wakil yang dipilih dalam suatu pemilihan umum. Akan tetapi, “wakil rakyat” dalam MPR terdiri dari anggota, baik yang dipilih dalam suatu pemilihan umum maupun mencakup anggota yang di angkat (Anwar, 2014).

Keunikan dalam hal kelembagaan dan kewenangan yang demikian itu dilekatkan pada MPR bukan tanpa alasan. Dalam sidang-sidang persiapan kemerdekaan terungkap bahwa para *faunding fathers* sama sekali tidak berfikir untuk menjadikan Amerika dan Eropa Barat sebagai *role model* ketatanegaraan Indonesia Merdeka. Trauma penjajahan Belanda dan situasi pembahasan di bawah kekuasaan Jepang menjadikan rapat-rapat pembahasan konstitusi dipenuhi retorika anti liberalisme dan anti demokrasi barat (Bahar dan Hudawati, 1998).

Namun pasca reformasi (tepatnya dalam Sidang Tahunan 2001), MPR memutuskan untuk menyempurnakan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 lama dan menggantinya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”. Perubahan tersebut mengisyaratkan bahwa kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (Huda, 2007). Dengan kata lain, MPR pasca perubahan UUD 1945 merupakan lembaga negara yang sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti: Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Perubahan kedudukan tersebut juga berimplikasi pada kewenangan dan keanggotaan MPR. Dalam hal kewenangan, MPR kini tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, tidak lagi berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya selama tidak ada usulan dari DPR setelah MK memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah, serta tidak lagi berwenang membuat dan menetapkan GBHN.

Wewenang yang masih melekat pada MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Sementara dalam hal keanggotaan, yang semula MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, kini keanggotaan MPR hanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan jenis penelitiannya adalah deduktif. . Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber . Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah (Ashshofa, 2004). Dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum perubahan), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Risalah Perubahan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan data sekunder yaitu

sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal dan makalah-makalah hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan untuk mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain kamus (hukum) dan ensiklopedia (Amirudin dan Askin, 2004). Metode analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendeskripsikan, menafsirkan dan mengintrepretasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan” (Moleong, 1991). Dari bahan dan data yang diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap. Desain Kedudukan Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Agenda utama sidang-sidang BPUPK adalah menyusun dasar negara Indonesia merdeka, terutama undang-undang dasar. Salah satu materi yang dibahas adalah keberadaan lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat. Usulan dibentuknya suatu lembaga yang mewakili seluruh bangsa Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Muh. Yamin dalam Rapat Besar BPUPK yang dipimpin oleh Dr. Radjiman pada 11 Juli 1945. Pada sebelumnya, tanggal 19 Mei 1945 Yamin menyebutkan: Pusat Parlemen Balai yang terbagi atas Majelis dan Balai Perwakilan Rakyat. Secara jelas dalam pidato tanggal 11 Juli 1945, Yamin menguraikan: “Kemudian di hadapan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara itu adalah Majelis Permusyawaratan untuk seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang menjadi kekuasaan setinggi-tingginya di dalam republik. Kekuasaan yang dipegang oleh permusyawaratan oleh seluruh rakyat Indonesia diduduki, tidak saja oleh wakil-wakil daerah Indonesia, tetapi semata-mata pula oleh wakil golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak. Majelis

permusyawaratan juga meliputi segala anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kepada Majelis Persiden bertanggung jawab. Jadi ada dua syaratnya, yaitu wakil daerah dan wakil golongan langsung dari pada rakyat Indonesia. Selanjutnya disebutkan pula oleh Yamin: Demikian pula dalam Majelis duduk wakil golongan-golongan rakyat (Manan, 2003).

Soepomo yang menjadi pemimpin Panitia Kecil Perancang UUD pada 13 Juli 1945 dalam Rapat Besar Panitia Perancang UUD yang dipimpin Soekarno menyampaikan usulan dibentuk Badan Permusyawaratan Rakyat. Usulan tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD yang ditentukan: *Souvereiniteit* berada di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Badan Permusyawaratan Rakyat. Pada rancangan UUD yang kedua, sebutan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPR) telah berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Istilah *Souvereiniteit* juga diubah menjadi “kedaulatan”, jadi Pasal 1 Ayat (2) ditentukan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Manan, 2005).

Selanjutnya dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Supomo menerangkan: Kedaulatan negara ada di tangan rakyat, sebagai penjelamaan rakyat, di dalam suatu badan yang dinamakan di sini: Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan negara yang yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi, yang tidak terbatas kekuasaannya. Maka Majelis Permusyawaratan rakyat yang memegang kedaulatan rakyat itulah yang menetapkan UUD, dan MPR yang mengangkat presiden. Maka Majelis Pemusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis besar haluan negara Sejak disahkannya UUD 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Pada tanggal 18 Agustus 1945, keberadaan MPR tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan. Ketentuan mengenai MPR diatur dalam: Bab I Pasal 1 Ayat (2), Bab II Pasal 2 dan 3, Bab III Pasal 6 Ayat (2), dan Bab XVI Pasal 37. Ketentuan tersebut mengatur tentang kedudukan, komposisi, dan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2), kedudukan MPR dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat karena merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willensdes Staatsvolkes*). Hal ini dapat dilihat komposisi MPR yang terdiri: anggota DPR yang merupakan institusi politik dengan mencerminkan perwakilan politik, utusan daerah yang mewakili aspirasi dari daerah, dan utusan golongan yang mencerminkan perwakilan golongan fungsional. DPR adalah lembaga perwakilan politik yang mementingkan aspirasi nasional, sedangkan utusan daerah merupakan unsur perwakilan daerah provinsi dan utusan golongan merupakan perwakilan unsur golongan fungsional. Utusan daerah dan utusan golongan bukan merupakan lembaga tersendiri, namun merupakan komponen keanggotaan MPR di samping anggota DPR. Perluasan komposisi tersebut dimaksudkan agar seluruh golongan tercermin dalam anggota MPR sehingga benar-benar merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia MPR kemudian mendistribusikan sebagian kekuasaannya secara vertikal- hierakis melalui sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) kepada lembaga tinggi negara dibawahnya yaitu: Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. MPR juga masih diberi kewenangan dalam ketatanegaraan Indonesia yang ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 37, dan Penjelasan UUD 1945 yaitu: (i) menetapkan dan mengubah UUD; (ii) menetapkan garis-garis besar (daripada) haluan negara (GBHN); (iii) memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden; (iv) meminta pertanggungjawaban presiden; dan (v) memberhentikan presiden. MPR juga mempunyai kekuasaan yang “tidak terbatas”. Kewenangan tersebut kemudian banyak dimanfaatkan untuk memperbesar kekuasaan presiden pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Seperti misalnya mengangkat Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963, dan meskipun Presiden Soeharto tidak ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, namun dapat memangku jabatannya selama tujuh periode berturut-turut atau selama 32 tahun. Presiden Soeharto juga diberikan kekuasaan tidak terbatas kepada MPR demi pembangunan melalui Ketetapan MPR No. V Tahun 1998 (Manan, 2005).

UUD 1945 setelah perubahan tidak lagi menempatkan MPR sebagai pemilik kekuasaan tertinggi negara dan pelaku yang menjalankan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) ditentukan: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, diubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hasil perubahan tersebut, menurut Muchamad Ali Safa'at membawa lima konsekuensi dasar, diantaranya yaitu: Pertama, penegasan bahwa prinsip demokrasi yang merupakan berwujud kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip negara hukum yang berpuncak pada supremasi konstitusi.

Kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi memegang kekuasaan sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, sehingga dengan sendirinya tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Ketiga, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh organ-organ konstitusi sesuai dengan yang ditentukan oleh UUD, sehingga organ-organ itu tidak lagi dibedakan secara hierarkis (setidaknya dapat dikatakan sederajat), tetapi dibedakan menurut fungsi dan wewenang yang diberikan oleh UUD 1945.

Keempat, terjadi perubahan wewenang yang dimiliki lembaga negara, khususnya MPR. Kelima, terjadi perubahan antara lembaga negara yang lebih mencerminkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi.

Perubahan kedudukan MPR membawa perubahan prinsip demokrasi yang berpuncak pada supremasi konstitusi, karenanya semua lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 merupakan pelaksana dari kedaulatan rakyat (secara langsung maupun tidak langsung). Lembaga-lembaga negara tersebut tidak lagi bersifat hierarkis, namun berdasarkan tugas dan wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 dengan menerapkan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi (*checks and balances*).

Hasil perubahan tersebut juga berimplikasi pada komposisi dan wewenang MPR. Komposisi MPR terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan, diubah menjadi terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa keanggotaan MPR merupakan unsur dari DPR dan DPD, karena komposisi MPR terdiri dari “anggota” bukan institusi. Hal ini menyebabkan, MPR baru dikatakan ada apabila selesai dilaksanakan pemilu DPR dan DPD, karenanya MPR bukan lagi lembaga yang berdiri sendiri namun terbentuknya berdasarkan terpilihnya anggota DPR dan anggota DPD melalui pemilu.

Perubahan juga nampak pada kewenangan MPR, setelah perubahan MPR mempunyai kewenangan yaitu: (i) mengubah dan menetapkan UUD; (ii) melantik presiden dan/atau wakil presiden; (iii) memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden. MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar (daripada) haluan negara (GBHN), dan memilih presiden dan wakil seperti yang direncanakan oleh *the founding fathers*. MPR masih diberikan kewenangan untuk memilih presiden dan/atau wakil presiden dalam keadaan darurat untuk mengisi lowongan jabatan.

Perubahan tersebut mengakibatkan MPR bukanlah organ yang pekerjaannya bersifat rutin, meskipun dalam UUD 1945 MPR sebagai lembaga negara memang terus ada, tetapi dalam arti aktual yang nyata organ MPR itu sendiri sebenarnya baru dapat dikatakan ada (*actual existence*) pada saat kewenangan atau *functie*-nya sedang dilaksanakan. Kewenangan MPR dapat dikatakan hanya bersifat “insidental” , karena satu-satunya wewenang MPR yang bersifat tetap adalah agenda pelantikan presiden dan wakil presiden dalam waktu lima tahun sekali, namun kewenangan tersebut hanya bersifat fakultatif, karena apabila MPR tidak dapat menjalankan kewenangannya, dapat digantikan oleh DPR atau pimpinan MPR yang disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Hasil kajian sejumlah penulis dan pengkaji hukum tata negara Indonesia juga mengatakan setelah perubahan UUD 1945 justru menghasilkan lembaga perlemen tiga kamar (trikameral) dengan menempatkan MPR sebagai kamar tersendiri dalam model lembaga parlemen Indonesia. Hal ini disebabkan dalam Pasal 2 Ayat (1) menyatakan frasa “anggota DPR dan anggota DPD”.

MPR juga mempunyai kewenangan tersendiri di luar fungsi legislasi DPR dan *co-legislasi* DPD oleh karena itu UUD 1945 hasil perubahan tidak menempatkan MPR menjadi sidang gabungan (*joint session*) antara DPR dan DPD.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berbagai uraian dalam pembahasan ini telah secara jelas menunjukkan bahwa kelembagaan MPR dari waktu ke waktu belum mampu menjelma menjadi kelembagaan MPR sebagaimana dicita-citakan oleh *faunding fathers*. dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka upaya mewujudkan kelembagaan MPR sebagaimana dicita-citakan tersebut, yakni MPR yang diposisikan sebagai “rumah rakyat”, “penjelmaan rakyat” dan “tempat seluruh rakyat” bermusyawarah guna mengambil keputusan- keputusan penting berkenaan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bagaimanapun, upaya tersebut dilakukan dengan tujuan sepenuhnya untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

UUD 1945 setelah perubahan telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya menganut pembagian kekuasaan (*distribution of power*) berubah menjadi pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) dengan menerapkan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi (*cheks and balances*). Kedudukan MPR berubah yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang sederajat, komposisi MPR pun berubah menjadi terdiri dari: anggota DPR dan anggota DPD, akibatnya kewenangan MPR dikurangi. MPR saat ini mempunyai kewenangan: (i) mengubah dan menetapkan UUD; (ii) melantik presiden dan/atau wakil presiden; (iii) memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden di tengah masa jabatan; dan (iv) memilih presiden dan/atau wakil presiden dalam mengisi lowongan jabatan. MPR tidak lagi menetapkan GBHN dan memilih presiden dan wakil presiden, akibatnya tidak satupun kewenangan MPR yang bersifat tetap. Keadaan ini berimplikasi pada: hubungan MPR antar lembaga negara yang sederajat, seperti:

presiden, DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi, terdapat instrumen baru pada substansi kewenangan MPR, peninjauan materi dan status Ketetapan MPR/S yang dikeluarkan melalui Ketetapan MPR No. I/MPR/2003.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan kepada DPR untuk merivisi UU tentang MD3, agar MPR hanya bersifat sementara saja karena tidak satupun wewenang yang dimilikinya bersifat tetap. Selain itu, agar MPR melakukan penataan kembali kewenangan yang dimilikinya melalui perubahan kelima UUD 1945. Hasil dari penelitian penulis, kewenangan tersebut menyisakan persoalan (tidak termasuk pelantikan presiden dan wakil presiden), karena kewenangan MPR belum pernah dilaksanakan dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945.

Khusus kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), perlu sekiranya untuk menindaklanjuti hasil penulisan hukum ini dengan melakukan penelitian lanjutan hingga pada akhirnya bermuara pada dilakukannya perubahan kelima terhadap UUD 1945 dengan materi perubahan kelembagaan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam penulisan hukum ini. Khusus kepada masyarakat, perlu untuk lebih proaktif dalam mengontrol penyelenggaraan bernegara di Indonesia guna membantu mewujudkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Askin, H. Zaenal. (2004). *Penghantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada.
- Anwar, M. Syafi'. (2014). *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Ashshofa, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bahar, Saafroedin dan Hudawati, Nannie. (1998). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-*

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Sekretariat Republik Indonesia

Huda, Ni'matul. (2007). *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi.* Yogyakarta :UII Press.

Manan, Bagir. (2003). *DPR, DPR dann MPR dalam UUD 1945 Baru,* Yogyakarta: FH UII Press.

Moleong, Lexi J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosyda Karya.

Suny, Ismail. (1977). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif.* Jakarta: Aksara Baru.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Setelah Perubahan)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Sebelum Perubahan)